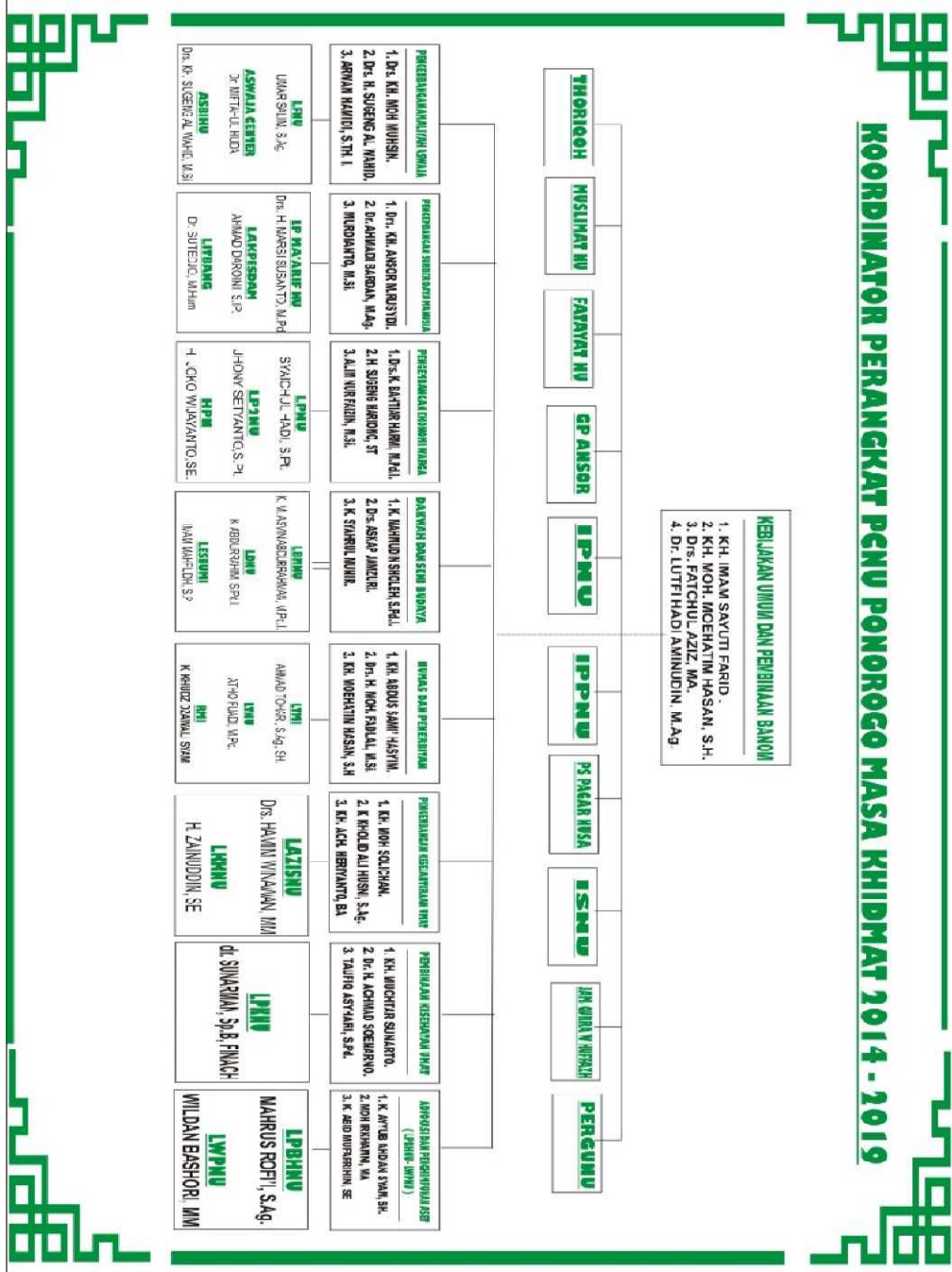


Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI NAHDLATUK ULAMA' (NU)

CABANG PONOROGO



Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI INTERVIEW



Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGIATAN KADERISASI NU PONOROGO

Lampiran 4

*Hasil Wawancara***1. Apa kedudukan mustasyar dalam organisasi Nahdlatul Ulama' (NU) dan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya?**

“Kalau mustasyar ini kan kedudukannya sebagai penasihat, jadi ya yang namanya penasihat tugasnya adalah menasihati pengurus baik diminta ataupun tidak. Tetapi mustasyar biasanya memberikan nasihat terkait dengan hal-hal yang dianggap penting saja” (KH. Husein Aly, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Jl. Parang Menang No. 21 Pukul 10.00 WIB)

2. Kemudian apa peranan penting Mustasyar dalam proses kaderisasi Nahdlatul Ulama' (NU)?

“Ya saya kira menasihati itu juga bagian dari kaderisasi secara informal ya, kalau kaderisasi secara formalnya lebih tepatnya bisa ditanyakan langsung dengan lembaga yang mengurus masalah pengaderan. Kalau mustasyar itu penasihat bagi pengurus yang tidak masuk secara dalam terhadap kaderisasi yang bersifat formal” (KH. Husein Aly, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Jl. Parang Menang No. 21 Pukul 10.50 WIB)

“Kalau formalnya kaderisasi di NU itu dimulai dari bawah seperti pada tingkatan pelajar, mahasiswa dan pemuda. Dilakukan secara berjenjang keatas dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur jadi nanti sebaiknya langsung menanyakan langsung kepada pengurus, nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail” (KH. Husein Aly, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Jl. Parang Menang No. 21 Pukul 10.15 WIB).

3. Bagaimana pandangan Mustasyar terkait pencapaian pengaderan di nahdlatul Ulama' (NU) selama satu periode kepengurusan ini serta bagaimana pencapaiannya dalam membangun kepemimpinan di Ponorogo?

“Kalau pencapaian kami kira ya relative, sebagaimana yang tadi saya katakan kalau prasyarat, tujuan dan juga target itu langsung dikelola oleh lembaga (pengurus) yang mengurus secara langsung, tetapi kalau sekedar pandangan ya kami kira sudah cukup bagus. Bagus itu dalam arti bahwa sejauh ini Nahdlatul Ulama' terus berkembang dengan baik. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Saya kira di tempat mbak juga berkembang secara dinamis ya, nanti kalau pulang bisa dicek secara langsung” (KH. Husein Aly Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Jl. Parang Menang No. 21 Pukul 10.20 WIB).

4. Apa kedudukan Syuriah di tubuh Organisasi nahdlatul Ulama' (NU), serta apa peranan syuriah didalam proses kaderisasi didalam organisasi?

“Secara umum syuriah memiliki peran sebagai pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan mempunyai tugas dan

wewenang menentukan arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Selain itu juga memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan pemahaman, pengamalan dan pengembangan ajaran Islam berdasar faham *Ahlussunah wal Jamaah* dan mengendalikan, mengawasi serta memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi. Bilamana perlu juga memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan lembaga” (Kh. Iman Sayuti Farid, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di PP. Jarakan Ponorogo 13.15 WIB).

“Dalam kaitannya dengan kaderisasi syuriyah memiliki peranan yang sangat penting karena wewenangnya yang mencakup semua aspek organisasi seperti pengarah dan penentu kebijakan meskipun secara teknis dilakukan oleh lembaga yang memang ditujukan untuk mengelola kaderisasi, jadi dari garis besar yang telah dibahas dan ditetapkan di tingkatan mustasyar ini kemudian di *breakdown* kebawah sesuai dengan *job description* masing-masing” (Kh. Iman Sayuti Farid, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di PP. Jarakan Ponorogo 13.20 WIB).

5. Menurut pandangan syuriyah dengan memperhatikan posisinya, bagaimana pencapaian kaderisasi yang telah dilakukan oleh NU Ponorogo selama ini khususnya dalam upaya membangun kepemimpinan di Ponorogo?

“Pencapaian yang selama ini sudah didapat ya memuaskan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam pengaderan internal. Dalam internal NU itu ya dakwah yang menjadi tolok ukur karena sudah merupakan khittah perjuangan. Namun demikian kalau penilaian secara umum ya relative tergantung dari mana melihatnya. Kalau pengaderan dari tahap ke tahap NU lebih diperankan oleh badan-badan otonom ya seperti IPPNU dari tingkat pelajar sampai tingkatan mahasiswa” (Kh. Iman Sayuti Farid, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di PP. Jarakan Ponorogo 13.25 WIB)..

6. Kalau tidak keberatan saya ingin menanyakan apa peranan tanfidziah didalam organisasi nahdlatul Ulama’ (NU) dan bagaimana cara kerja tanfidziah dalam melakukan proses pengaderan?

“Tanfidziah itu secara umum sebagai pelaksana organisasi memiliki tugas formalnya seperti memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriyah, melaksanakan program Jam’iyah Nahdlatul Ulama’, membina dan mengawasi kegiatan yang dilakukan Lembaga atau perangkat dibawahnya dan juga menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriyah tentang pelaksanaan tugasnya”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.20 WIB).

“Dalam melakukan pengaderan Nahdlatul Ulama’ (NU) juga dilakukan oleh tanfidziyah melalui lembaga-lembaga yang ada dibawahnya Lembaga Kaderisasi Nahdlatul Ulama’ (LKNU) sebagai bentuk pelaksanaan

dari garis besar yang telah ditetapkan sebelumnya. Umumnya garis besar itu secara kasar sudah ditetapkan melalui program kerja”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Kantor Insuri Ponorogo 15.25 WIB).

“Selain itu juga ada Pagar Nusa, Fattayat NU yang semuanya juga melakukan proses kaderisasi pada bidang masing-masing. Pada masing-masing organisasi otonom itu juga memiliki pedomannya sendiri yang tentunya juga sudah disesuaikan dengan garis besar yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi keruwetan didalamnya”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.30 WIB).

7. Mohon dijelaskan lebih lengkapnya bagaimana pola yang dilakukan oleh NU dalam kaderisasi, melibatkan siapasaja?

“NU adalah organisasi yang paling jelas proses kaderisasinya. Tidak hanya berhenti di kalangan mahasiswa dan atau pelajar di lingkungan lembaga pendidikan, melainkan juga hingga ke daerah-daerah terpencil di pelosok desa. Ada istilah Pimpinan Ranting (PR) untuk kepengurusan NU dan perangkat-perangkatnya di tingkat akar rumput”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.30 WIB).

“Kaderisasi NU, sudah dimulai dari pelajar melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) serta Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU), bagi calon kader di tingkat mahasiswa ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), meskipun dalam perkembangannya PMII memilih independen, tidak terikat secara struktur. Pengaderan kemudian dilanjutkan lagi pada Ansor yang, semestinya, di sini calon kader NU sudah tidak perlu diragukan lagi ke-NU-annya, karena ini adalah kawah candradimuka terakhir sebelum calon kader NU menjadi pengurus NU”. (Drs. Fatchul Aziz, MA Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.35 WIB).

8. Kemudian bagaimana cara NU dalam melakukan rekrutmen kader? Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi kader NU?

“Ya seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau secara formalnya lebih banyak melalui rekomendasi kepengurusan yaitu pengurus ranting, Tetapi kebanyakan pengaderan itu dimulai dari tingkatan pelajar, mahasiswa dan pemuda baik IPPNU maupun Ansor. Selain itu juga ada Muslimat dan lain sebagainya” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.40 WIB).

“Kader yang masuk melalui rekomendasi maupun melalui proses dari bawah ini tentunya sudah pernah mendapatkan materi-materi tentang keNUan sehingga pada perkembangannya nanti juga akan dilakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka menguatkan pemahaman, sedangkan kader yang masuk melalui jalur informal seperti halnya melalui Kartanu atau pendaftaran online itu nanti akan didata oleh pengurus guna rekomendasi terhadap pengurus di daerah asal pendaftar agar dilakukan pelatihan”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 15.45. WIB).

9. Dalam dokumen draft program kerja yang saya dapatkan dikantor terlihat lengkap dan ada program kaderisasi yang terlihat sangat umum, bagaimana pada tahapan pelaksanaannya?

“Program kerja itu menyeluruh pada masing-masing bidang yang ada disusun berdasarkan usulan dan kebijakan dalam rangka menguatkan organisasi kedepan. Program pengaderan juga sama, dibahas oleh semua elemen didalam rapat program kerja kemudian pada akhirnya dijalankan oleh lembaga atau bagian yang mengurus secara khusus” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Jumat 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU, Ponorogo 13.45. WIB).

“Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai perubahan bentuk kegiatan dengan catatan tidak menyimpang dari garis besar yang telah ditetapkan didalam program kerja sehingga menyesuaikan keadaan yang sedang berkembang” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Jumat 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU, Ponorogo 13.50. WIB).

10. Kalau tidak salah organisasi-organisasi otonom dibawah NU juga memiliki struktur sampai ke tingkat pusat, apakah hal ini tidak mengganggu atau menimbulkan masalah dalam kaderisasi? Bagaimana menurut pandangan bapak?

“Benar. Jadi seperti halnya IPPNU, Banser, GP Ansor dan juga Muslimat juga memiliki jenjang sampai ke tingkat Nasional. Bisa saja ada perbedaan katakanlah kurikulum ya dalam bahasa lainnya mengingat bahwa masing-masing organisasi ini memiliki tingkatan, orientasi yang berbeda-beda tetapi ada satu kesamaan dimana paham keNUan ini semua ditanamkan atau menjadi pelajaran yang paling dasar yang harus dipahami dan di amalkan oleh semua anggota organisasi” (Dr. Lutfi Hadi Aminudin, M.Ag, Wawancara Jum’at 2 Oktober 2015 di Bareng Babadan Ponorogo, Pukul 14.50 WIB).

11. Tetapi bukankah NU sendiri memiliki program kerja setiap setahun sekali, apakah itu juga tidak mengganggu jalannya kaderisasi kalau semuanya punya pedoman masing-masing?

“Program kerja itu program kerja kepengurusan cabang dalam bidang pendidikan dan kaderisasi. Meski demikian sebagai pelaksanaanya juga tidak sepenuhnya dari cabang. Disana sudah tertulis PC NU PC Banom, PC Lakpesdam NU dan dibantu oleh PC IPNUIPPNU, RMI PC LPM dan KaSek/KaMad ini maknanya bahwa secara kasar sudah ada penyesuaian di dalamnya bahwa secara garis besar kaderisasi memiliki kesamaan meskipun dilakukan oleh banon dan juga organisasi-organisasi binaan Nahdlatul Ulama’. Jadi namanya binaan itu tentu tidak keluar dari induknya” (Dr. Lutfi Hadi Aminudin, M.Ag, Wawancara Jum’at 2 Oktober 2015 di Bareng Babadan Ponorogo, Pukul 15.00 WIB).

12. Banyak isu berkembang kalau NU identic dengan garis keturunan kiyai dalam hal penentuan kepengurusan, mungkin Bapak berkenan menjelaskan hal tersebut kepada saya pak, bagaimana sebenarnya proses penentuan atau penjaringan kepengurusan di NU itu?

Masalah kepemimpinan internal itu Nahdlatul Ulama’ (NU) memiliki prosedur formal baik di tingkat pusat, daerah, cabang sampai dengan tingkat ranting yaitu melalui musyawarah dengan penamaan khusus yang diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga tidak dilakukan secara sepihak” (H. Sugeng. H, Wawancara Jum’at 2 Oktober 2015 di Patihan Siman Ponorogo Pukul 16.00 WIB).

Adapun prosesnya selain melalui rekomendasi juga dilakukan pemilihan guna menentukan siapa yang terbaik diantara yang baik dengan melihat proses waktu kaderisasi yang dijalani, kecakapan serta intelektualitas dan loyalitas terhadap organisasi. Ya saya rasa semua juga dilewati oleh semua organisasi kader yang ada di Indonesia”. (H. Sugeng. H, Wawancara Jum’at 2 Oktober 2015 di Patihan Siman Ponorogo Pukul 16.00 WIB).

13. Sebenarnya apakah ada pola kaderisasi di Nu yang secara khusus ditujukan untuk pembangunan kepemimpinan di daerah?

“Kaderisasi yang ada di NU itu adalah kaderisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ditindak lanjuti melalui keputusan serta program kerja kepengurusan. Jadi diluar itu tidak ada proses formal lain”. (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Babadan Ponorogo 13.50. WIB).

“Kalau berbicara kepemimpinan lokal atau kepemimpinan di Ponorogo secara organisatoris NU tidak kearah itu sesuai dengan Khittah Organisasi NU tidak terjun ke dunia Politik, akan tetapi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti halnya ketika disitu aada kader-kader yang berkecimpung didalamnya, maka dilihat bahwa secara organisatoris NU yang berperan meskipun sejatinya itu adalah personal atau etis” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Babadan Ponorogo 13.55. WIB).

14. Jika NU secara organisasi membatasi diri terhadap kepemimpinan di Ponorogo, lalu bagaimana caranya agar pemikiran-pemikiran NU dapat dilaksanakan khususnya dalam mencetak kepemimpinan?

“Meskipun organisasi tidak kearah itu tetapi penting juga bagaimana NU membicarakan masalah kepemimpinan lokal dalam kaitannya dengan masa depan umat. Intinya kepemimpinan yang baik pada gilirannya akan menciptakan peradaban yang baik pula demikian juga sebaliknya pemimpin yang suka korupsi juga akan merugikan kepentingan rakyat banyak” (KH. Drs. M. Muhsin, M.Ag, Wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2015 di Insuri Ponorogo 13.00. WIB).

“Dalam konteks itu, Nahdlatul Ulama’ (NU) perlu melakukan musyawarah meskipun tidak berlaku mengikat terhadap kader bahwa NU perlu melakukan pandangan obyektif mengenai ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu seperti inilah, atau memberikan pesan dan harapan agar kepemimpinan yang terpilih mampu menjaga dan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan undang-undang” (KH. Drs. M. Muhsin, M.Ag, Wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2015 di Insuri Ponorogo 13.05. WIB).

15. Banyak calon-calon kepala daerah yang ditengarai sebagai kader NU, bagaimana hal tersebut menurut Bapak? Apakah NU diperbolehkan untuk berpolitik praktis?

“Tidak benar kalau NU itu terlibat dalam dunia politik apapun alasannya karena kita mengacu kepada garis besar Khittah Organisasi. Adapun banyak kader NU yang terlibat itu secara personal makna bahwa semakin baik pengaderan yang dilakukan di internal NU itu” (KH. Adnan Qohar, Wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2015 di Ponorogo 14.00. WIB).

16. Bagaimana pendapat bapak mengenai pencapaian NU Ponorogo dalam membangun kaderisasi ?

“Untuk melihat pencapaian pengaderan kita melihat program kerja terlebih dahulu kalau itu dianalisa secara formal. Nah banyak pandangan dan penilaian terkait hal tersebut biasanya akan diuraikan melalui forum evaluasi di tiap-tiap tingkatan sampai pada akhirnya di tingkat kepengurusan” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo 14.10. WIB)

“Menurut saya sudah baik hal tersebut karena secara kualitas kita terus berkembang demikian juga secara kuantitas. Kalau hasil evaluasi pada kepengurusan kemarin pun juga menyimpulkan hal yang sama kalau saya lihat. Jadi secara kualitas maupun kuantitas kami terus berkembang. Barangkali adalah bagaimana pengembangan dan caranya mengelola potensi yang ada

itulah yang perlu untuk ditegaskan kembali” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo 14.15. WIB).

“Sudah baik, ya secara umum sudah baik tetapi itu perlu dilihat lagi bagaimana tujuan mulanya yang ada didalam program kerja ya itu secara teknisnya tetapi menurut hemat saya pengaderan yang ada selama ini sudah baik” (Kh. Drs. Mujahidin Farid, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Keniten Ponorogo 14.30. WIB)

“Saya hanya berharap supaya pengaderan terus ditingkatkan lagi tidak hanya secara kuantitas tapi yang paling penting adalah secara kualitasnya khususnya yang ada di bidang dakwah biar apa yang menjadi cita-cita NU ini akan tercapai dengan baik” (Kh. Drs. Mujahidin Farid, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Keniten Ponorogo 14.35. WIB)

“Pengaderan adalah inti dari perkembangan organisasi mbak, jadi kalau Nahdlatul Ulama’ (NU) masih eksis sampai dengan saat ini ya itu tandanya kalau pengaderan yang ada di dalam masih dilakukan dengan baik. Kalau secara formalnya atau sesuai dengan target atau tidak ya yang tau adalah pengurus, tentu disana ada dukumen yang mendukung”. (Drs. Supeni Harso, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Halmahera Ponorogo 11.30. WIB).

“Kalau secara formalnya saya kurang tau ya mbak tapi kalau pandangan saya secara umum ya sudah bagus karena kalau yang saya tahu seperti Ansor, PMII, IPPNU juga semakin berkembang kalau di daerah saya itu banyak dan sering melakukan agenda-agenda baik secara internal maupun bersama-sama dengan masyarakat”. (Hariyadi, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Sawoo Ponorogo 16.30. WIB).

“Sebagai seorang kader saya hanya bias menyampaikan apa yang saya alami dan saya ketahui. Terkait dengan kepemimpinan saya kira NU memberikan sumbangan besar. Meskipun yang ada bukan seorang kader yang benar-benar kader, tetapi NU tetap bisa andil dalam pembentukan kepemimpinan melalui kebijakan internal maupun eksternalnya terhadap keputusan-keputusan kepemimpinan itu sendiri”. (Agus Sutopo, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Sawoo Ponorogo 17.00. WIB).

17. Faktor apa saja yang selama ini dianggap dapat atau masih menghambat jalannya kaderisasi pak?

“Pada dasarnya faktor penghambat itu pasti ada dan justru disitulah makna dari kaderisasi. Kalau internal ya yang paling utama adalah bagaimana cara kita untuk mendidik, membangun sumber daya kader itu sendiri. Banyak kader berasal dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang berbeda-beda sedangkan organisasi sejatinya ingin menyatukan persepsi

diantara semua kader untuk suatu pencapaian. Saya kira ini merupakan faktor terberat yang harus dilalui oleh organisasi dalam kaitannya dengan pengaderan” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 16.20 WIB).

“Kedua selain kader ya siapa yang mengkader?. Jadi maksudnya yang mengkader juga harus memiliki kapabilitas yang mumpuni di bidangnya. Nah saya kira hal yang demikian ini masih menjadi kendala yang perlu ditingkatkan baik kemampuannya, pemahaman tentang keNUannya dan kedisiplinan serta tekatnya harus benar-benar dibangun agar tercapai pengaderan yang baik” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 16.25 WIB).

“Kita harus berterus terang bahwa masih terdapat banyak perbedaan persepsi terkait dengan perangkat pengaderan. Maksudnya adalah standarisasi pola. Kalau di Nahdlatul Ulama’ ini pengaderan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di bawah NU di semua tingkatan. Ini merupakan salah satu agenda besar yang kemarin dibahas didalam musyawarah nasional di Jombang” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo 15.15. WIB).

“Finansial saya kira juga dapat menjadi kendala mengingat organisasi ini bukan organisasi profit oriented, tetapi perlu dipahami bahwa faktor finansial bukan merupakan kendala utama dalam pengaderan. Kekompakan, kedisiplinan dan kesungguhan dari pengurus dan juga dari kader-kader itulah yang perlu mendapatkan perhatian sehingga tidak terkesan hanya bekerja untuk meingkatkan kuwantitas, sedangkan kualitasnya tidak memiliki prioritas” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo 15.20. WIB).

18. Faktor apa yang mendukung kaderisasi di organisasi Nahdlatul Ulama’ sehingga NU masih terus Eksis sampai dengan saat ini khususnya di Ponorogo?

“Kondisi masyarakat menjadi faktor pendukung Utama. Di ponorogo ini terdapat puluhan ya, jadi banyak sekali pondok pesantren yang berafiliasi terhadap Nahdlatul Ulama’. Tentu karena didalamnya juga ada pengajaran mengenai keNUan akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pengaderan pada saat kader-kader tersebut memasuki organisasi. Hal itu akan mendukung pribadi kader itu sendiri sedangkan bagi organisasi akan berpengaruh kepada target pencapaian kuwantitas maupun kualitas sesuai harapan” (Moh. Irhamni, BA, Wawancara pada Sabtu 2 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo 15.30. WIB).

“Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan seperti Ma’arif sangat mendukung pengaderan khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai

keNUan. Kalau kaitannya dengan fungsionaris, kekompakan dan kesamaan persepsi serta semangat yang tinggi dari para pengurus tentu juga mempengaruhi jalannya kaderisasi, artinya bahwa roda kepengurusan dari tingkat cabang sampai anak ranting benar-benar hidup” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 16.30 WIB).

“Dukungan langsung dari kepengurusan di segala tingkatan serta dukungan pemerintah dan masyarakat secara umum adalah faktor pendukung utama kaderisasi. Sampai dengan sejauh ini kalau NU di Ponorogo saya rasa telah memenuhi dukungan-dukungan tersebut” (Drs. Fatchul Aziz, MA, Wawancara pada Kamis 1 Oktober 2015 di Sukosari, Babadan, Ponorogo 16.35 WIB).



Lampiran 5

TUJUAN VISI DAN MISI NU**A. Tujuan**

Tujuan didirikannya NU adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah dengan menganut salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta mempersatukan langkah para ulama' beserta pengikut-pengikutnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.

B. Visi dan Misi

Nahdlatul Ulama' mempunyai visi dan misi yang jelas sebagai jamiah yang berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah.

1. Visi NU

Visi NU yaitu menjadikan wadah perjuangan ulama' dan pengikutnya yang bergerak dalam bidang agama dan sosial kemasyarakatan demi terwujudnya Khoiru Ummah.

2. Misi NU

- a. Dalam bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah Wal Jama'ah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Dalam bidang edukatif, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk membina umat Muslim agar menjadi Muslim yang taqwa, berbudi, luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Dalam bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Dalam bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan, berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Dalam bidang usaha lain, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khoiru Ummah.

